83

PERANAN SEKTOR KEHUTANAN DALAM PEMBANGUNAN MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI LOKAL

Dudung Darusman dan Dodik Ridho Nurochmat
(Guru Besar dan Dosen di Fakultas Kehutanan IPB)

Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Sehari
"Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Era Otonomi Daerah",
dalam rangka Dies Natalis IPB ke-37

Sebenarnya cukup sulit bagi penulis untuk menguraikan peranan sektor kehutanan dalam pembangunan melalui pemberdayaan potensi lokal sebagaimana topik yang digariskan dalam seminar ini. Di satu sisi spektrum pembangunan sangat luas, namun di sisi lain untuk menganalisa potensi lokal Bogor atau Jawa Barat perlu data yang sangat spesifik. Meskipun demikian, dengan segala keterbatasan data, makalah ini akan mencoba memaparkan secara komprehensif dimulai dari kondisi sektor kehutanan nasional yakni situasi perekonomian makro dan kondisi sumberdaya hutan nasional. Setelah memperoleh gambaran bagaimana sektor kehutanan nasional, disajikan potensi lokal sumberdaya hutan (Jawa Barat) serta beberapa alternatif dalam mengembangkan sektor kehutanan berdasarkan *local specifics*.

1. Kondisi Makro Ekonomi dan Sektor Kehutanan Nasional

Perkembangan sektor kehutanan Indonesia saat ini dan masa mendatang, tidak terlepas dari kondisi makro ekonomi Indonesia khususnya keadaan pasca krisis moneter. Krisis politik dan ekonomi yang berawal dari badai krisis moneter pada bulan Juli 1997 telah mengguncang ekonomi nasional, termasuk tentu saja produk hasil hutan kayu. Pada tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap US dollar merosot hingga 72 %, laju inflasi mencapai 78 %, nilai ekspor menurun hingga 81 % dan impor-pun mengalami kondisi serupa menurun 34 %. Tidak hanya itu, defisit anggaran mencapai 8,5 % dan GDP mengalami kontraksi hingga lebih dari 13 %.

Sektor industri adalah sektor yang terkena dampak paling serius dari kebijakan suku bunga "super tinggi" yang ditetapkan pemerintah akhir tahun 1998 sampai pertengahan 1999. Kebijakan ini secara langsung mengakibatkan industri mengalami kelangkaan dana untuk biaya produksi, sehingga impor bahan dasar industri mengalami penurunan secara drastis hingga 39 % pada tahun 1998. Akibatnya, volume produksi rata-rata sektor industri juga turun sampai dengan 13 %. Meskipun demikian, pada sektor kehutanan hanya industri *plywood* yang mengalami penurunan ekspor cukup tajam yakni 61 % pada tahun 1998, sedangkan industri perkayuan lainnya justru mampu mendongkrak nilai ekspor hingga 20 % pada tahun 1998 (*CIC, 1999*), meskipun apabila dicermati peningkatan ekspor ini lebih banyak disebabkan oleh faktor melemahnya nilai tukar rupiah.

Kondisi industri kehutanan Indonesia yang terbukti cukup kuat bertahan di masa krisis ekonomi, menunjukkan rendahnya ketergantungan terhadap bahan impor pada *wood based industries*. Hal ini menunjukkan apabila dikelola dengan baik, industri perkayuan tetap dapat diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian nasional untuk bangkit melewati masa krisis. Namun demikian, kesalahan dalam pengambilan kebijakan terutama yang menyangkut masalah sosial yang merupakan imbas dari krisis ekonomi sangat potensial menyebabkan runtuhnya industri kehutanan mengingat faktor eksternalitas dalam bisnis kehutanan, khususnya dewasa ini, diduga berpengaruh kuat terhadap jalannya proses produksi lebih daripada dampak krisis ekonomi itu sendiri.

Pada sektor kehutanan, krisis moneter yang bermuara pada krisis ekonomi dan politik mengakibatkan perubahan-perubahan yang sangat signifikan pada kebijakan pengusahaan hutan. Dari sisi pelaku bisnis kehutanan, kepemilikan saham group-group perusahaan besar banyak mengalami pergeseran seiring dengan maraknya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian juga dengan hapusnya peran sentral asosiasi perdagangan kayu, dengan dibubarkannya Badan Pemasaran Bersama (BPB) berdampak luas terhadap strategi pemasaran dan peta bisnis perkayuan Indonesia.

Kebijakan pemerintah di bidang kehutanan yang membatasi luas kepemilikan HPH dan redistribusi pengelolaan hutan kepada koperasi dan pengusaha kecil yang ditandai dengan pencabutan ijin beberapa HPH besar seluas 9 juta hektar, tentu sangat potensial mengubah pola *supply* dan *demand* kayu bulat (log).

2. *Kondisi Sumberdaya Hutan Nasional*

Menurut data Statistik Indonesia (1997), pola alokasi atau pemanfaatan lahan berdasarkan penunjukkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menunjukkan luas hutan tetap adalah 113.241.000 Ha yang meliputi 58 % dari luas daratan Indonesia.

Hasil hutan berupa kayu terutama dihasilkan dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 63 juta Ha. Dari luasan hutan produksi 63 juta Ha ini, 1,8 - 2 juta Ha merupakan hutan produksi tetap yang ada di Jawa berupa hutan tanaman, selebihnya adalah hutan alam yang ada di luar Jawa. Selain berupa hutan produksi, hutan yang berfungsi produksi juga ada di luar hutan tetap yaitu hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dengan luas areal ± 30 juta Ha.

Menurut Sutter (1989) *dalam* Anonimous, 1997, laju perubahan fisik hutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas kurang lebih mencapai 906.400 hektar per tahun. Di era euforia reformasi dewasa ini, dimana penegakan hukum mencapai titik terlemah, laju perusakan hutan pasti jauh di atas angka 1 juta hektar/tahun atau di atas 1,5 % per tahun dari total hutan produksi yang ada. Bahkan pada pertengahan tahun 2000 ini, Departemen Kehutanan dan Perkebunan menyatakan bahwa laju deforestasi saat ini diperkirakan tidak kurang dari 1,6 juta hektar/tahun.

Sampai dengan tahun 1996, berdasarkan data hasil Inventarisasi Hutan Nasional dalam Statistik Sumberdaya Hutan Indonesia, hutan dengan fungsi produksi adalah seluas ± 94,9 juta Ha, yang terdiri atas areal tidak berhutan seluas ± 23,9 juta Ha (25 %), dan yang berhutan seluas ± 70 juta Ha (75 %). Areal tidak berhutan ini sebagian besar berada di Kalimantan (39 %) dan di Sumatera (34 %). Luas areal dan kondisi hutan dengan fungsi produksi disajikan pada **tabel 1.** di bawah ini.

Dalam rangka upaya rehabilitasi hutan tidak produktif dan peningkatan potensi produksi kayu guna memenuhi kebutuhan bahan baku industri perkayuan, sejak awal tahun 1990-an telah dicanangkan program pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pembangunan HTI ditargetkan ± 4,6 juta Ha yang akan dibangun di luar Jawa, sedangkan hutan tanaman yang sudah ada di Jawa ± 1,8 juta Ha, sehingga luas total hutan tanaman/HTI mencapai 6,4 juta Ha.

Realisasi pembangunan HTI selama periode tahun 1990 - 1998 yang dibangun di luar Jawa seluas 2.013.298 Ha. Dari segi macam HTI yang dibangun adalah HTI pulp 956.326 Ha, HTI non-pulp 799.210 Ha dan HTI trans 257.762 Ha. Berdasarkan realisasi pembangunan tanaman dari HTI tersebut, luas rata-rata pembangunan HTI 223.688 Ha/th, terdiri dari HTI pulp 106.258 Ha/th, HTI non-pulp 8.801 Ha/th dan HTI trans 28.6[illegible]0 Ha/th. Dengan asumsi laju pembangunan HTI relatif tetap yaitu 223.688 Ha/th, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan HTI seluas 4.6 juta Ha lebih kurang 20 tahun, yaitu sampai tahun 2010.

Tabel 26. *Luas Areal Berhutan dan Tidak Berhutan pada Hutan dengan Fungsi Produksi (HP+HPT+HPK), 1996*

Pulau	***Areal Berhutan (1000 Ha)***				
	Hutan Dataran Rendah	***Hutan Mangrove***	***Hutan Rawa***	***Total***	***%***
Sumatera	*7.445,3*	*369,9*	*5.766,7*	*13.581,6*	*19,1*
Kalimantan	*22. 618,9*	*749,2*	*3.638,7*	*27.006,8*	*38,1*
Sulawesi	*4.502,5*	*65,7*	*10,3*	*4.578,5*	*6,5*
Maluku	*4.641,4*	*202,5*	*38,7*	*4.882,6*	*6,9*
Irian Jaya	*14.691,2*	*596,5*	*4.941,1*	*20.228,8*	*28,5*
Bali+Nusa Tenggara+Timor	*683,2*	*1,4*	*1,6*	*686,2*	*1,0*
Total –1	54.582,5	1.984,9	14.397,1	70.964,5	100,0
Pulau	***Areal Tidak Berhutan (1000 Ha)***				
	Lahan Kering Tidak Produktif	***Lahan Basah Tidak Produktif***	***Pertanian***	***Total***	***%***
Sumatera	*3.958,2*	*661,5*	*2.090,2*	*6.709,9*	*30,3*
Kalimantan	*5.583,0*	*1.053,6*	*2.351,6*	*8.988,2*	*40,6*
Sulawesi	*919,4*	*91,0*	*545,2*	*1.555,6*	*7,0*
Maluku	*740,4*	*26,0*	*331,4*	*1.097,8*	*5,0*
Irian Jaya	*805,7*	*976,6*	*262,4*	*2.044,7*	*9,2*
Bali+Nusa Tenggara+Timor	*946,8*	-	*770,5*	*1.717,3*	*7,8*
Total - 2	12.953,5	808,7	6.351,3	22.113,5	100,0
Total 1 + 2	**67.536,0**	**4.793,6**	**20.748,4**	**93,078,0**	

3. *Potensi Sektor Kehutanan di Jawa Barat*

Untuk mengetahui potensi pengembangan sektor kehutanan di Propinsi Jawa Barat, terlebih dahulu perlu dikaji sumberdaya hutan yang dimiliki serta peruntukannya. **Tabel 27.** dan **28.** berikut ini menyajikan keadaan (peruntukkan) sumberdaya hutan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan pada tahun 1997 dan 1999.

Tabel 27. *Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Jawa Barat (1997)*

Hutan Lindung (Ha)	*Suaka Alam & Hutan Wisata (Ha)*	*Hutan Produksi Terbatas (Ha)*	*Hutan Produksi Tetap (Ha)*	*Hutan Produksi Konversi (Ha)*	*Areal Penggunaan Lain (Ha)*
240.000	*220.000*	*213.000*	*339.000*	*0*	*3.612.339*
5,19 %	4,7 %	4,60 %	7,33 %	0,00 %	78, 12 %

Tabel 28. *Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Jawa Barat (1999)*

Hutan Lindung (Ha)	*Suaka Alam & Hutan Wisata (Ha)*	*Hutan Produksi Terbatas (Ha)*	*Hutan Produksi Tetap (Ha)*	*Hutan Produksi Konversi (Ha)*	*Areal Penggunaan Lain (Ha)*
322.250	*259.991*	*0*	*385.859*	*0*	*3.656.239*
6,97 %	5,62 %	0 %	8,33 %	0,00 %	79, 07 %

Dari data Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Jawa Barat di atas, terlihat terjadi pergeseran luasan areal untuk masing-masing kategori hutan di Jawa Barat dalam kurun waktu 1997 -1999. Hutan produksi terbatas yang tercatat sebesar 213.000 Ha pada tahun 1997, ternyata pada tahun 1999 sebagian dialihfungsikan menjadi hutan lindung, suaka alam dan hutan wisata, hutan produksi tetap, serta areal penggunaan lain. Proporsi luasan dalam TGHK untuk hutan lindung mengalami penambahan sebesar 1,78 %, suaka alam dan hutan wisata bertambah 0,56 %, dan areal penggunaan lain bertambah 0,95 %.

Meskipun proporsi luasan hutan produksi tetap terlihat betambah 1 %, namun secara keseluruhan proporsi hutan produksi (tetap dan terbatas) di Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup besar dari 11,93 % pada tahun 1997 menjadi hanya 8,83 % pada tahun 1999 atau berkurang sebesar 3,6 % dari dua tahun sebelumnya.

Tabel 29. *Produksi Kayu Bulat dan Kayu Olahan Propinsi Jawa Barat 1997/1998*

Kayu Bulat (m^3)		*Kayu Gergajian (m^3)*		*Kayu Lapis (m^3)*	
Nasional	*Jawa Barat*	*Nasional*	*Jawa Barat*	*Nasional*	*Jawa Barat*
29.520.322	*374.340*	*2.613.452*	*4.930*	*6.709.835*	*23.411*
	1,27 %		0,19 %		0,35 %

Dari sisi produktivitas sebenarnya hutan produksi di Jawa Barat (diduga) menunjukkan nilai produktivitas di atas rata-rata hutan produksi nasional. Secara sederhana kita dapat berhitung bahwa luasan hutan produksi Jawa Barat hanya sekitar 385 ribu Ha (**Tabel 29.**) atau hanya 0,61 % dari total luas hutan produksi nasional yang 63 juta Ha, sementara kayu bulat yang dihasilkan mencapai 1,27 % dari total produksi kayu bulat nasional. Hal ini setidaknya disebabkan oleh 3 faktor utama, yakni : pertama, keadaan tanah yang relatif lebih subur dan kondisi iklim yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis pohon. Kedua, jenis hutannya adalah hutan tanaman (Perum Perhutani) dan hutan rakyat yang perlakuan pemeliharaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan hutan alam. Ketiga, sebagian besar hutan di Jawa Barat dikelola dengan sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) yang produksi per hektarnya tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI).

Ketiga faktor di atas merupakan argumen teknis yang rasional, namun pada saat penegakan hukum mencapai titik terendah sebagaimana terjadi dewasa ini dan tidak tertutup kemungkinan besarnya volume produksi kayu bulat Jawa Barat saat ini sebenarnya adalah "angka semu" karena faktor kayu ilegal yang masuk dari Jawa Tengah maupun luar Jawa. Kemungkinan terakhir ini peluangnya cukup besar, mengingat Jawa Barat khusunya Botabek merupakan pasar yang sangat potensial dengan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita yang relatif tinggi sehingga merupakan daya tarik bagi masuknya kayu ilegal.

4. *Beberapa Alternatif Pengembangan Usaha Sektor Kehutanan di Jawa Barat*

Dengan data yang terbatas, sebenarnya cukup sulit menentukan secara tepat produk unggulan Jawa Barat untuk sektor kehutanan. Namun, dengan sepenuhnya menyadari berbagai keterbatasan informasi yang dimiliki dalam makalah ini penulis mencoba untuk menyajikan beberapa alternatif produk kehutanan yang sekiranya sesuai dengan Propinsi Jawa Barat, berdasarkan kondisi sumber bahan baku dan pasar yang ada.

Tabel 30. *Beberapa Alternatif Pengembangan Usaha Kehutanan di Jawa Barat*

Jenis Usaha	Sumber Bahan Baku	Industri Strategis	Differential Advantages
Hasil Hutan Kayu	1. Perum Perhutani 2. Hutan Rakyat	Wood Furniture	1. Medium-High Quality Products 2. Knock-down Furniture 3. Branded
Hasil Hutan Non-Kayu	1. Perum Perhutani 2. Usaha Kehutanan Masyarakat	Misal : madu, jamur, tanaman obat, dsb	Bahan Baku Industri
Jasa Rekreasi	Taman Nasional, Suaka Alam, Hutan Wisata, Flora & Fauna	Ekowisata	Integrated Ecotourism

<u>Hasil Hutan Kayu</u>

Untuk produk perkayuan mengingat keterbatasan sumber bahan baku yang ada dan semakin sulitnya mengharapkan kontinuitas *supply* bahan baku dari propinsi lain di masa mendatang, disarankan untuk memprioritaskan produk perkayuan yang mempunyai nilai tambah dan daya saing tinggi. Salah satu jenis industri pengolahan kayu yang memenuhi kedua kriteria tersebut untuk kondisi Jawa Barat adalah *wood furniture*. Pasar *furniture* baik domestik maupun internasional masih terbuka lebar. Pertumbuhan konsumsi *furniture* terkait erat dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga, perumahan, dan pendapatan. Sebagai daerah yang paling dekat dengan pusat perekonomian nasional, laju konsumsi *wood furniture* domestik di Jawa Barat khususnya Botabek diperkirakan lebih tinggi di atas laju konsumsi nasional (di atas 4 % per tahun). Sedangkan untuk pasar internasional peluang peningkatan ekspor *wood furniture* masih sangat terbuka mengingat *market share* Indonesia di pasar *furniture* internasional masih kurang dari 1 %. Melihat kenyataan bahwa banyak negara pengekspor *wood furniture* seperti Taiwan dan Singapura tidak mempunyai sumber bahan baku yang memadai, maka peluang Indonesia meningkatkan pangsa pasar cukup terbuka. Kelemahan *furniture* Indonesia adalah pada standar mutu produk dan merk dan agar dapat eksis, *furniture* Jawa Barat harus mencapai standar kualitas produk yang konsisten (konsisten berarti sesuai dengan standar dan tidak harus *luxury products*) serta harus mampu meng-*create brand* (dalam hal ini dari segi akses pasar dan akses informasi Jawa Barat mempunyai peluang lebih besar dibandingkan daerah lain untuk menciptakan *branded products*).

Agar industri *furniture* Jawa Barat dapat berkembang lebih baik di masa mendatang, beberapa hal sebagai berikut harus diperhatikan :

Pertama, salah satu ciri kebanyakan idustri *furniture* skala kecil dan menengah adalah adanya kecenderungan membuat perabot (*furniture*) dengan sistem satu tukang satu perabot. Hal ini telah membentuk pola industri yang kurang menunjang usaha peningkatan kapasitas karena sulit menekan biaya produksi dan sulit mencapai standar mutu yang konsisten sehingga produk menjadi kurang kompetitif baik dari segi harga maupun kualitas.

Kedua, secara umum *wood furniture* dari bahan baku kayu solid mempunyai harga yang lebih tinggi, namun menghadapi masalah baik dari bahan baku maupun teknologi. Dalam hal ini ada suatu dilema yang sulit, untuk memasuki pasar kelas menengah akan menghadapi kendala mahalnya bahan baku sementara untuk memasuki pasar kelas atas yang berselera tinggi harus didukung oleh kemampuan disain yang memadai, di samping faktor kemapanan *brand*.

Ketiga, tidak disarankan membuat *brand* untuk *furniture* ukiran, khususnya Jati, karena mebel ukuran Jati bukan karakter khas Jawa Barat dan akan sangat sulit untuk mengalihkan *image* konsumen, kecuali hanya untuk bisnis *finishing* dan *outlet* (*showroom*). Di masa yang akan datang untuk kondisi Jawa Barat, perlu dikembangkan upaya untuk memproduksi *branded knock-down furniture*, dengan model-model yang *up to date* mengikuti selera pasar internasional.

Hasil Hutan Non-Kayu

Banyaknya industri farmasi termasuk *food supplemen* di kawasan Jabotabek, merupakan potensi besar bagi Jawa Barat untuk memasok bahan baku pendukung yang dapat dimanfaatkan dari pengelolaan hasil hutan non-kayu. Beberapa jenis hasil hutan non-kayu yang potensial untuk dikembangkan di Jawa

Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan industri farmasi dan *food supplemen* di kawasan Jabotabek diantaranya adalah madu, tumbuh-tumbuhan obat, dan jamur. Beberapa yang dikemukakan di sini baru prediksi, sedangkan untuk mengetahui jenis dan volume hasil hutan non-kayu yang benar-benar dibutuhkan pasar tentunya memerlukan kajian yang lebih mendalam. Dalam hal ini, yang ingin penulis tekankan adalah bahwa Jawa Barat mempunyai keunggulan komparatif dalam memasok hasil hutan non-kayu, setidaknya ditinjau dari dua hal. Pertama, keunggulan kedekatan akses ke banyak industri. Kedua, kondisi alam Jawa Barat yang subur dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan berbagai usaha kehutanan non-kayu.

Jasa Ekowisata

Melemahnya nilai tukar rupiah, sebenarnya merupakan kesempatan yang baik untuk menarik devisa dari sektor pariwisata, temasuk tentu saja wisata alam hutan atau ekowisata. Pengembangan ekowisata dalam sektor kehutanann adalah altenatif peningkatan devisa yang strategis dan sangat potensial di masa depan, mengingat potensi produksi kayu dari hutan kita yang telah jauh merosot. Pengembangan ekowisata juga sangat sesuai dengan potensi lokal Jawa Barat, khususnya Bogor, yang sangat kaya dengan ragam keindahan alamnya. Keberadaan Kebun Raya, Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Hutan Wisata memungkinkan untuk dikembangkan secara ekonomis, melihat kecenderungan permintaan terhadap jasa rekreasi alam yang terus meningkat. Investasi wisata alam cukup menjanjikan keuntungan meskipun *payback period* tidak terlalu cepat.

Kunci dari keberhasilan pengelolaan wisata alam adalah kreatifitas dan kejelian memanfaatkan setiap potensi alam untuk dikemas dalam paket wisata yang menarik. Dalam hal ini tidak ada salahnya kalau kita menengok negeri jiran Malaysia yang cukup baik dalam mengelola wisata alamnya. Di sana pada hutan wisata terdapat *Canopy Walk* atau jembatan tajuk, yang memberi kesempatan kepada pengunjung untuk berjalan-jalan di antara tajuk pohon. Bahkan cahaya kunang-kunang di malam hari dipadu dengan keasyikan berperahu dayung dapat diramu menjadi obyek wisata yang menarik. Dalam pengembangan ekowisata, kreatifitas berarti uang.

Jawa Barat mempunyai potensi besar mengembangkan ekowisata yang terintegrasi, misalnya dengan menciptakan jalur-jalur wisata untuk beberapa pilihan obyek wista alam yang menarik. Aksesibilitas yang relatif mudah serta jarak yang relatif dekat dari pintu gerbang masuk internasional Bandara Soekarno-Hatta harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendorong berkembangnya wisata alam di Jawa Barat. Hanya, untuk mengembangkan ekowisata secara optimal perlu suasana yang kondusif khususnya situasi keamanan yang harus stabil dan terjamin.

Apabila situasi ekonomi dan keamanan Indonesia sudah mulai membaik, sesungguhnya ekowisata justru lebih dapat diharapkan menjadi andalan sektor kehutanan Jawa Barat di masa yang akan datang, dibandingkan dengan produk perkayuan

5. ***Kesimpulan***

1. Kebijakan suku bunga super "tinggi" yang pernah diterapkan pemerintah pada saat puncak krisis moneter 1998 mengakibatkan industri mengalami kelangkaan dana untuk biaya produksi, sehingga impor bahan dasar industri mengalami penurunan secara drastis hingga 38 % pada tahun 1998. Akibatnya, volume produksi rata-rata sektor industri juga turun sampai dengan 13 %. Namun demikian, pada sektor kehutanan hanya industri *plywood* yang mengalami penurunan ekspor cukup tajam yakni 61 % pada tahun 1998 sedangkan industri perkayuan lainnya justru mampu mendongkrak nilai ekspor hingga 20 % pada tahun 1998 (*CIC,1999*). Kondisi industri kehutanan Indonesia yang terbukti cukup kuat bertahan di masa krisis ekonomi, menunjukkan rendahnya ketergantungan terhadap bahan baku impor pada *wood based industries*. Hal ini menunjukkan apabila dikelola dengan baik, industri perkayuan (secara selektif) tetap dapat diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian nasional untuk bangkit melewati masa krisis. Namun, kesalahan dalam pengambilan kebijakan, terutama yang menyangkut masalah sosial yang merupakan imbas dari krisis ekonomi sangat potensial menyebabkan runtuhnya industri kehutanan mengingat faktor eksternalitas dalam bisnis kehutanan, khususnya di masa euforia reformasi dewasa ini, berpengaruh kuat terhadap jalanannya proses produksi lebih daripada dampak krisis ekonomi itu sendiri.

2. Pada masa sekarang ini, dimana penegakan hukum mencapai titik terlemah, laju perusakan hutan diperkirakan jauh di atas angka 1 juta hekta/tahun atau di atas 1,5 % per tahun dari total hutan produksi yang ada. Bahkan pada pertengahan tahun 2000 ini, Departemen Kehutanan dan Perkebunan menyatakan bahwa laju deforestasi saat ini diperkirakan tidak kurang dari 1,6 juta hektar/tahun. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang produk perkayuan yang dikembangkan harus benar-benar selektif dalam arti sesuai dengan potensi lokal, bernilai tambah tinggi dan kompetitif karena jumlah bahan baku yang semakin terbatas.

3. Salah satu jenis industri pengolahan kayu yang memilik nilai tambah dan daya saing tinggi untuk kondisi Jawa Barat adalah *wood furniture*. Pasar *furniture* baik domestik maupun internasional masih terbuka lebar. Pertumbuhan konsumsi *furniture* terkait erat dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga, perumahan, dan pendapatan. Sebagai daerah yang paling dekat dengan pusat perekonomian nasional, laju konsumsii *wood furniture* domestik di Jawa Barat khususnya Botabek diperkirakan lebih tinggi di atas laju konsumsi nasional. Sedangkan untuk pasar internasional, peluang peningkatan ekspor *wood furniture* masih sangat terbuka mengingat *market share* Indonesia di pasar *furniture* internasional masih kurang dari 1 %. Kelemahan *furniture* Indonesia adalah pada standar mutu produk dan merk, dan agar dapat eksis, *furniture* Jawa Barat harus mencapai standar kualitas produk yang konsisten (konsisten berarti sesuai dengan standar dan tidak harus *luxury products*) serta harus mampu meng-*create brand*. Dalam hal ini, dari segi akses pasar dan akses informasi Jawa Barat mempunyai peluang lebih besar dibandingkan daerah lain untuk menciptakan *branded products* untuk *wood furniture* non-ukiran, misalnya *knock-down furniture*.

4. Jawa Barat mempunyai keunggulan komparatif dalam memasok hasil hutan non-kayu, setidaknya ditinjau dari dua hal. Pertama, keunggulan kedekatan akses ke banyak industri khususnya industri farmasi dan *food supplemen*. Kedua, kondisi alam Jawa Barat yang subur dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan berbagai usaha kehutanan non-kayu, misalnya madu, tumbuhan obat, jamur, dan sebagainya.
5. Pengembangan ekowisata dalam sektor kehutanan adalah alternatif peningkatan devisa yang strategis dan sangat potensial di masa depan, mengingat potensi produksi kayu dari hutan kita yang telah jauh merosot. Pengembangan ekowisata juga sangat sesuai dengan potensi lokal Jawa Barat, khususnya Bogor, yang sangat kaya dengan ragam keindahan alamnya. Apabila situasi ekonomi dan keamanan Indonesia sudah mulai normal, ekowisata sebenarnya justru lebih dapat diharapkan menjadi andalan sektor kehutanan Jawa Barat di masa yang akan datang, dibandingkan dengan hasil hutan kayu yang jumlah bahan bakunya semakin tebatas.

Semoga makalah yang sederhana ini dapat ikut memperkaya wacana dalam upaya pemberdayaan potensi lokal menyongsong era otonomi daerah di Jawa Barat, khususnya Bogor.